

LAPORAN AKHIR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



Penanggung Jawab Kegiatan:

Dea Amanda, S.Tr.Pt

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Unit kerja	:	BPSIP Kalimantan Barat
3	Alamat unit kerja	:	Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara Telp. 0561-882069
4	Sumber dana	:	APBN melalui DIPA BPSIP Kalimantan Barat TA 2024
5	Status kegiatan (L/B)	:	Lama (L)
6	Penanggung Jawab	:	 a. Nama b. Pangkat/Golongan c. Jabatan
7	Lokasi	:	Kalimantan Barat
	Agroekosistem	:	-
8	Tahun Mulai	:	2024
9	Tahun Selesai	:	2024
10	Output Tahunan	:	Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalbar tahun 2024
11	Output Akhir	:	Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat
12	Biaya	:	Rp. 12.500.000

Pontianak, Desember 2024

Ketua Tim Kerja DSIP,

Agus Subekti, S.P., M.P
NIP. 19750122 1999013 1 001

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian,

Dr.Ir. Syamsuddin, M.Sc
NIP. 19670514 199703 1 002

Penanggung Jawab,

Dea Amanda, S.Tr.Pt
NIP. 19901101 201503 1 002

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat,

Anjar Suprapto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

RINGKASAN

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Kegiatan Pelayanan Publik ini bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi publik khususnya hasil litkaji BPSIP Kalimantan Barat. Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalbar yang disepakati pada acara public hearing kemudian ditetapkan dengan SK Kepala BPSIP Kalimantan Barat No. 68/Kpts/HM.130/H.12.15/06/2023 terhadap 3 (Tiga) layanan yaitu: pelayanan pengujian penerapan standar instrumen spesifik lokasi, layanan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, layanan pengelolaan produk standar instrumen spesifik lokasi.

Terdapat 35 permintaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan pemenuhan dengan status selesai, artinya layanan informasi publik yang di berikan sudah 100% terpenuhi

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2023 sebesar 91,3 % yang berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2024 dinilai sangat baik oleh masyarakat

Kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pelayanan Publik BPSIP Kalbar di Tahun 2023 yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak adanya pegawai formasi pranata humas dan pranata komputer dalam pengelolaan informasi public, minimnya kunjungan secara offline ke perpustakaan BPSIP Kalbar, koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang memadai dan belum diperbaharui secara berkala

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat hingga selesai penyusunan laporan Tahun 2024. Laporan ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPSIP Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Kegiatan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Pontianak, Desember 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pertimbangan	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	2
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	3
2.1. Sumber Daya Manusia dan Anggaran.....	3
2.2 Sarana dan Prasarana	5
2.3 Kegiatan Utama	6
IV. PENUTUP.....	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Saran	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2023	4
Tabel 2. Daftar Medsoc BPSIP Kalimantan Barat	7
Tabel 3. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat	12

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Kalimantan Barat.....	3
Gambar 2. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi	6
Gambar 3. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi.....	6
Gambar 4. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi	6
Gambar 5. Barcode Form Permintaan Layanan	6
Gambar 6. Contoh Permintaan Informasi Secara On Visit (Form Tertulis) ...	7
Gambar 7. Contoh Permintaan Informasi Secara Online	8
Gambar 8. Dokumentasi kegiatan BPSIP Kalimantan Barat di Media Sosial.....	9
Gambar 9. Dokumentasi Informasi Publik yang bisa di akses di Website Resmi BPSIP Kalbar	9
Gambar 10. Dokumentasi Informasi Publik Dalam Bentuk Media Cetak	10
Gambar 11. Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Tahun 2024	11
Gambar 12. <i>Rekapitulasi</i> Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Tahun 2024...	11

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia". Indonesia telah berada di tengah-tengah percepatan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di seluruh Asia Tenggara ini "raksasa sedang log on" ke internet, karena menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka (thinkwithgoogle , 2018).

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh (Anonim, 2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan entripoint mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang ini, bertujuan untuk membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup, menuju pemerintahan yang terbuka (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2015). Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

1.2. Dasar Pertimbangan

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government maka diwajibkan semua instansi daerah memiliki situs web. Ini sesuai dengan tahap awal dari pengembangan e-Government, yaitu berturut-turut memiliki situs web, memiliki layanan interaktif, kemudian mengembangkan transaksi elektronik atau via website dan yang terakhir adalah seluruh layanan ditransformasikan ke bentuk elektronik. Hal ini didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hal ini merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia (Biro Hukum dan Informasi Publik, 2009).

1.3. Tujuan dan Keluaran

1.3.1 Tujuan

- Menyelenggarakan pelayanan Informasi publik BPSIP Kalimantan Barat

1.3.2 Keluaran

- Terselenggarakannya pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2024

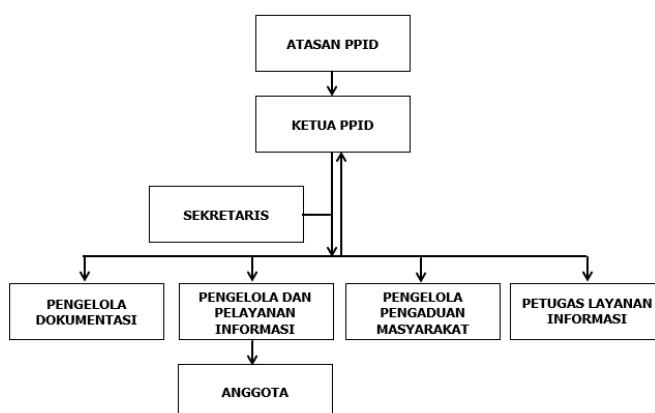
II. PELAKSANAAN KEGIATAN

BPSIP Kalimantan Barat secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Meneteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 dan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomo 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID Pelaksana BPSIP Kalimantan Barat adalah Kepala BPSIP Kalimantan Barat.

2.1. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi yang telah dibentuk PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Barat nomor 20/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Lampiran 1)



Gambar 1. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Kalimantan Barat

2.1.2 Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2024 termasuk dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Dapat di lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Kemajuan Keuangan Tahun 2024

Kode	Tolok Ukur	Jumlah dana dalam DIPA	Rencana Realisasi dana bulan ini (Rp)	Realisasi dana s/d bulan ini (Rp)	Sisa dana (Rp)
		(Rp)			
051.0B	Layanan PPID	12.500.000	12.500.000	12.440.000	60.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
524111	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.500.000	6.500.000	6.440.000	60.000
	Jumlah	12.500.000	12.500.000	12.440.000	0
	Realisasi Keuangan (%)				99,52

2.2 Sarana dan Prasarana

BPSIP Kalimantan Barat melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, email, dan media sosial seperti facebook.

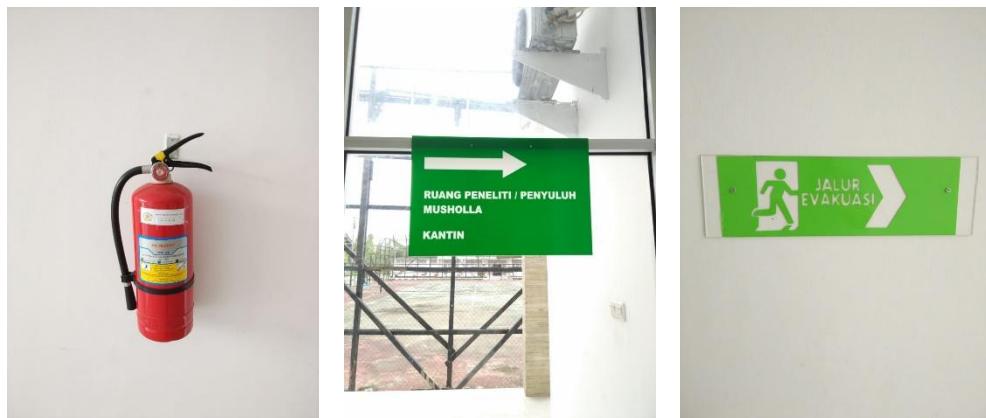
Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Barat telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan beberapa unit pendukung, seperti meja informasi, tempat layanan informasi, perangkat komputer, printer, website (kalbar.litbang.pertanian.go.id), email (BPSIP-kalbar@pertanian.go.id, BPSIPkalbar@yahoo.com), media sosial (facebook: BPSIP Balitbangtan Kalimantan Barat). Ruang *front desk* dan ruang tamu difungsikan sebagai salah satu ruang pelayanan informasi ini berada di lobi utama BPSIP Kalimantan Barat.



Gambar 2. Meja informasi dan Ruang Pelayanan Informasi



Gambar 3. Banner dan Poster Informasi di Ruang Layanan Informasi



Gambar 4. Peralatan keselamatan dan Papan Petunjuk Informasi

2.3 Kegiatan Utama

Selama tahun laporan, PPID BPSIP Kalbar telah melaksanakan beberapa kegiatan utama, antara lain:

2.3.1 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BPSIP Kalbar dapat dilaksanakan secara langsung atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke meja informasi BPSIP Kalbar (*on-visit*) dan bila *online* dapat melalui facebook, email, maupun whatsapp.

Setiap permohonan pelayanan informasi publik pemohon wajib mengisi form permintaan layanan secara online maupun mengisi secara tertulis, untuk form pelayanan online BPSIP Kalimantan Barat telah menyediakan scan barcode di meja petugas layanan informasi.



Gambar 5. Barcode Form Permintaan Layanan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PPID PELAKUKAN BPSIP KALIMANTAN BARAT

Jl. Ratu Onno No. 01 Samar Halu Postkast 7021
Telp. (061) 828209 Fax. (061) 828383
Website: www.kalbar.bsp.pertanian.go.id E-mail: bsp.kalbar@pertanian.go.id, bspkalbar@gmail.com

FORM PERNYATAAN INFORMASI PUBLIK
No. Peraturan : JIKA/S/ /20

Permohonan Isi surat ini

Nama Lengkap: *Permanadi Iskandarmah, SP*
Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
Pekerjaan: Petani/Perkebunan Peternak/BIBIM
 TNI Pegawai Pemerintah
 Polisi Pegawai Swasta
 Ngarai Guru
 Lainnya Mahasiswa

Alamat: *N. Kompl. misteri Seni BMS. KB.A-33*
Nomor RT/RW: *RT.01 RW.2 d.00000000*
Nomor Telepon/HP: *031 23.50.76.8089*
Email/Alamat Situs Web: *abdiiepkn2023.zigmail.com*

Cara Memperoleh Informasi: Melalui surat/telepon/elektronik
 Melalui wawancara/mengunjungi/kunjungan
 Mendapatkan salinan informasi konsorsium
 Mendapatkan salinan informasi sebagian
 Mengambil langsung
 Dikirim melalui email
 Dikirim melalui pos/jasa pengiriman

Cara Mendapatkan Salinan Informasi: Mengambil langsung
 Dikirim melalui pos/jasa pengiriman

Layanan Publik yang Diminta

Jenis Layanan	Tujuan Perolehan Informasi/Layanan Publik
<input checked="" type="checkbox"/> LAYANAN USA-PENDIDIKAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPERIK	<i>Untuk memperbaiki instrument.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> LAYANAN pengujian/informasi teknis dan sertifikasi	<i>Orang menanyakan tentang teknis dan sertifikasi.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> LAYANAN PEMIMPINAN PENERAPAN DAN DISERAHKAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (SPP)	<i>Layanan guna taktik, kegiatan dan teknologi.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Konsultasi dan informasi teknis	<i>Untuk menghindari hal-hal yang</i>

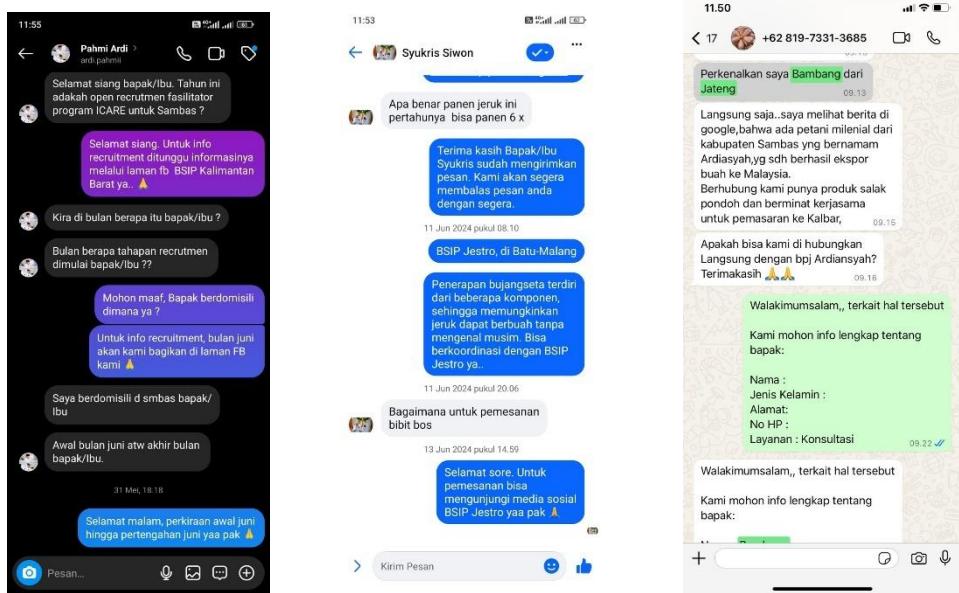
Gambar 6. Contoh Permintaan Informasi Secara *On Visit* (Form Tertulis)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPSIP Kalbar telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://kalbar.bsip.pertanian.go.id>. serta Portal PPID <http://bptpkalbar.ppid.pertanian.go.id/>.

Tidak hanya melalui website, diseminasi informasi dan teknologi BPSIP Kalbar juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti facebook, youtube, instagram dan twitter. Berikut tabel link media social BPSIP Kalimatan Barat.

Tabel 2. Daftar Medios BPSIP Kalimantan Barat

Media Sosial	Link	Pengikut
Facebook	https://www.facebook.com/BPSIPBalitbangtanKalbar	4500
Youtube	https://www.youtube.com/channel/UC8o19JjP9h8aKyg0gVqbFHw	3310
Instagram	https://www.instagram.com/BPSIPkalbar/	165
Twitter	https://twitter.com/BPSIP_kalbar	118

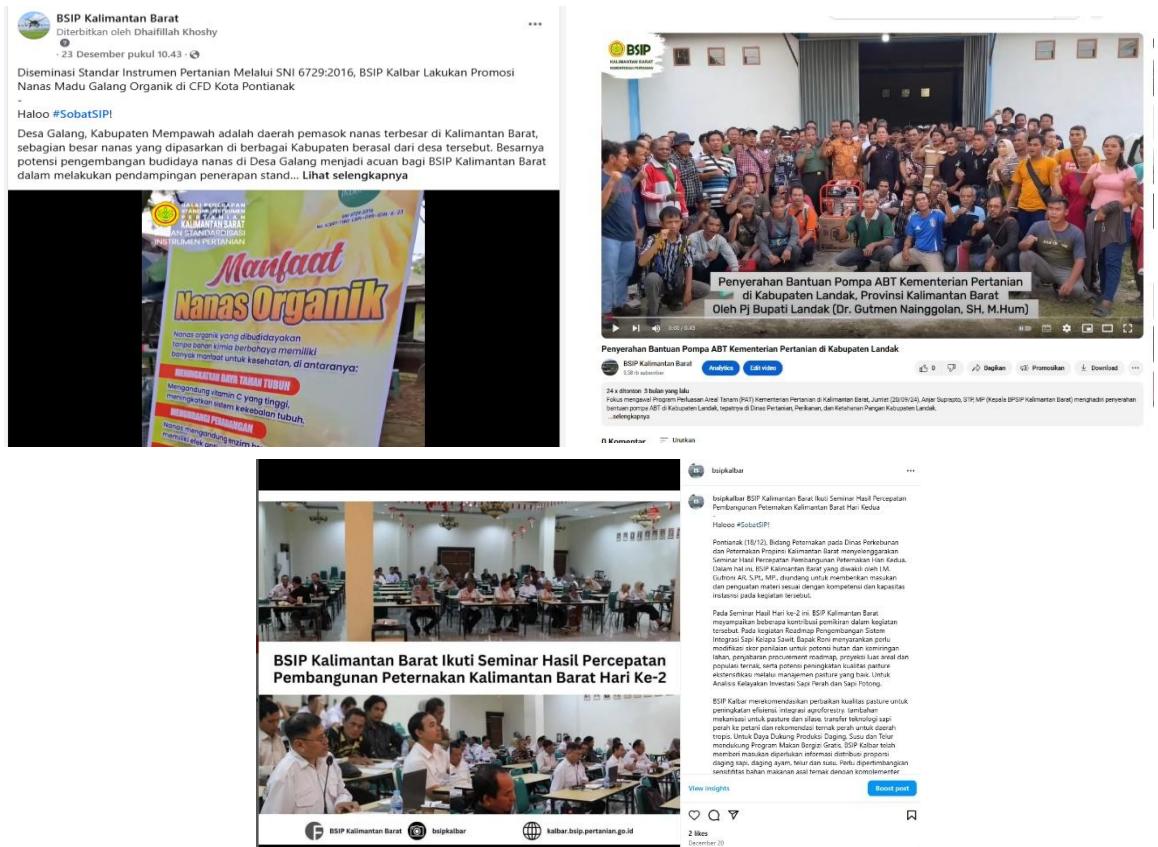


Gambar 7. Contoh Permintaan Informasi Secara Online

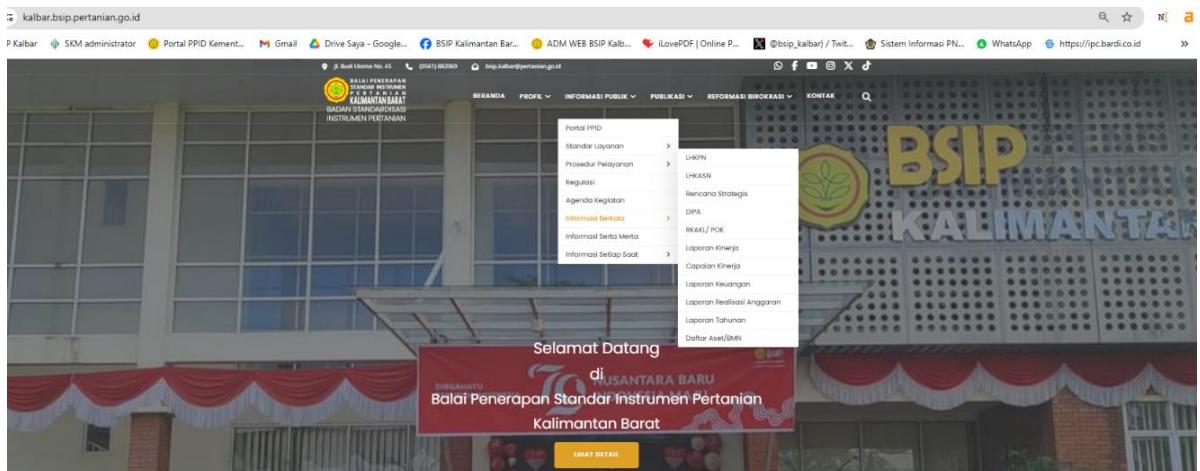
2.3.2 Menyediakan Informasi Online dan Media Cetak

- **Menyediakan informasi online**

PPID BPSIP Kalimantan Barat menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses secara online melalui situs web resmi dan media sosial. Informasi yang disediakan meliputi berita kegiatan BPSIP Kalimantan Barat, serta dokumen-dokumen yang bersifat berkala seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), laporan tahunan, laporan keuangan, daftar informasi publik, Surat Keputusan (SK) PPID, laporan PPID, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), serta pelaporan LHKASN dan LHKPN. Dengan pendekatan ini, PPID memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan terkini.



Gambar 8. Dokumentasi kegiatan BPSIP Kalimantan Barat di Media Sosial



Gambar 9. Dokumentasi Informasi Publik yang bisa di akses di Website Resmi BPSIP Kalbar

- **Menyediakan Informasi Melalui Media Cetak**

PPIID BPSIP Kalimantan Barat menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses secara langsung di ruang pelayanan informasi publik seperti informasi profil unit kerja dan infomasi pertanian dalam bentuk buku dan leaflet.



Gambar 10. Dokumentasi Informasi Publik Dalam Bentuk Media Cetak

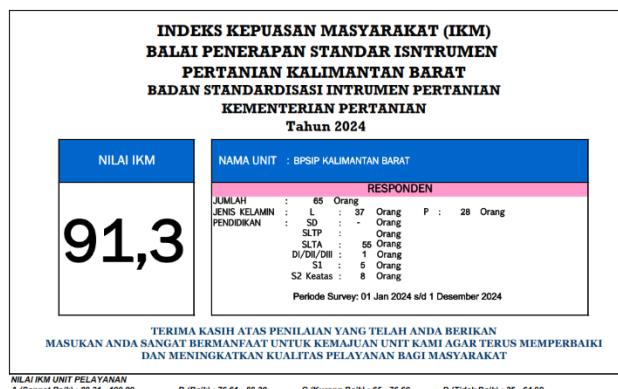
2.3.3 Evaluasi Berkala

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik,

baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.

Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Hasil pengukuran IKM BPSIP Kalbar tahun 2024 yaitu **91,3 %** sehingga mutu layanan bernilai **A** yang berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2024 dinilai **Sangat Baik** oleh masyarakat.



Gambar 17. Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Tahun 2024

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,88
U2	Prosedur Pelayanan	3,49
U3	Waktu Pelayanan	3,66
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,60
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,74
U6	Kompetensi Pelaksana	3,78
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,60
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,68
U9	Sarana dan Prasarana	3,78
Nilai Indek Rata-Rata Layanan		3,69
Nilai IKM		91,34

Gambar 18. Rekapitulasi Nilai IKM Pelayanan BPSIP Kalbar Tahun 2024

2.3.3 Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat

Berikut rekapitulasi permohonan informasi publik BPSIP Kalbar melalui berbagai saluran. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BPSIP Kalbar pada Tahun 2024 adalah sebanyak 35 permohonan informasi publik dengan jenis kategori agribisnis diselsaikan dalam waktu 1 hari.

Tabel 3. Rekapitulasi permohonan pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Barat

No.	Tanggal Pemohon	Nama Pemohon	Usia*	Pekerjaan / Instansi	Saluran Pemohon	Jenis Kelamin	Informasi Publik Yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	31 Januari 2024	Permadi Kusumah	38	Petani	konter layanan	Laki-laki	Konsultasi terkait tanaman hortikultura (cabai, pepaya, dll)	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Didik Saifuddin & Hartono	1 Hari	Selesai
2	7 Maret 2024	Sri Nurmanita	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Mencari informasi terkait magang, fakultas pertanian , ilmu dan teknologi pangan	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Thalea	1 Hari	Selesai
3	14 Maret 2024	Lisna	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Mencari informasi terkait analisis sampel pupuk organik	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Sution/Thalea	1 Hari	Selesai
4	4 April 2024	Ismi	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Mencari informasi terkait standar pemupukan NPK untuk tanaman mentimun pada tanah pmk	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono/trisna	1 Hari	Selesai
5	18 April 2024	Meningai	20	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Mencari informasi dosis pemupukan NPK pada tanaman lobak putih	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Hartono/trisna	1 Hari	Selesai

6	23 April 2024	Emilia Farida	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Mencari informasi terkait penelitian/praktikum di lab tanah	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Sution/Thalea	1 Hari	Selesai
7	31 Mei 2024	Tata Ruang Alam Semesta	26	Petani	Online	Laki-laki	Mencari informasi Koperasi Binaan Program ICARE Kalimantan Barat	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Thalea	1 Hari	Selesai
8	31 Mei 2024	Pahmi Ardi	24	Petani	Online	Laki-laki	Mencari informasi recruitment fasilitator program ICARE di Kab. Sambas	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Sution	1 Hari	Selesai
9	9 Juni 2024	Intan	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
10	9 Juni 2024	Jelita Aprilia	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
11	12 Juni 2024	Fiza Tri Novita	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
12	12 Juni 2024	Oktaianti Renti	18	Mahasiswi	konter layanan		Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
13	12 Juni 2024	Rossa Putri Filian	20	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
14	12 Juni 2024	Abuu Usamah	19	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
15	12 Juni 2024	Mukti Fahrul Khoiruddi	18	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
16	3 Juni 2024	M. Sinambela	37	Wiraswasta	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
17	3 Juni 2024	Ambrosius Algato	42	Wiraswasta	konter layanan	Laki-laki	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan Uji C-organik, N-	1 Hari	Selesai

									Kjedahl, P tersedia, pH, Tekstur, K- total		
18	1 Juli 2024	Dini	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Laboratorium	Agribisnis	Telah di lakukan Uji P dan K	1 Hari	Selesai
19	1 Juli 2024	Yosafat Dedisius	18	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
20	1 Juli 2024	Kutriana	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
21	1 Juli 2024	Riska Maulidia	18	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
22	1 Juli 2024	Jaya Mulya Tambunan	19	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
23	8 Juli 2024	Adelia Irma Fransisca	19	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
24	8 Juli 2024	Nurul Iza	18	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
25	8 Juli 2024	Bella Andini	17	Mahasiswi	konter layanan	Perempuan	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
26	15 Juli 2024	Carolus Willi Candra	19	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
27	15 Juli 2024	Rafli Ahmad	19	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
28	22 Juli 2024	Abang Hafiz	20	Mahasiswa	konter layanan	Laki-laki	Magang	Agribisnis	Magang di Kantor BPSIP Kalbar	1 Hari	Selesai
29	12 Juli 2024	Irena Valeria Nunung	32	Wiraswasta	konter layanan	Perempuan	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan Uji C-Organik, pH, N, P, K	1 Hari	Selesai

									Total, Kadar air		
30	19 Juli 2024	Muhammad Rizal Fahrezi	28	Wiraswasta	konter layanan	Laki-laki	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan Uji Kadar air, C-organik, N total	1 Hari	Selesai
31	1 Agustus 2024	Kholil	27	Wiraswasta	konter layanan	Laki-laki	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan Uji N,P,K, Kadar airr	1 Hari	Selesai
32	19 September 2024	Susilawati	31	Wiraswasta	konter layanan	Perempuan	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan Uji N,P,K Total	1 Hari	Selesai
33	12 November 2024	Bambang	38	Wiraswasta	Online	Laki-laki	Informasi Pertanian	Agribisnis	Telah dilakukan Konsultasi dengan Ya Lukman	1 Hari	Selesai
34	11 Desember 2024	Dayang Dinda Widjani	21	Mahasiswa	konter layanan	Perempuan	Informasi Pertanian	Agribisnis	Mencari informasi data jenis tanah kalimantan barat	1 Hari	Selesai
35	2 Desember 2024	Ika Wiendratmo, SP	37	ASN	konter layanan	Laki-laki	Laboratorium	Agribisnis	Telah dilakukan uji pH H ₂ O dan pH KCl	1 Hari	Selesai

2.3.3 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Barat adalah:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Tidak adanya pegawai formasi pranata humas dan pranata komputer dalam pengelolaan informasi publik
- Minimnya kunjungan secara offline ke perpustakaan BPSIP Kalbar
- Koleksi artikel/buku/majalah ilmiah kurang memadai dan belum diperbaharui secara berkala

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Selama Tahun 2024 BPSIP Kalbar telah melakukan kegiatan pelayanan informasi publik dengan **capaian kinerja** 100%. Dari Sebanyak 35 pelayanan informasi publik terlayani dengan **baik**, artinya layanan informasi publik yang di berikan sudah 100% terpenuhi. Selama Tahun 2024 tidak ditemukan pengaduan Masyarakat.

Kepuasan pelayanan berdasarkan penilaian IKM selama Tahun 2023 yaitu 91,3 % berarti bahwa kinerja BPSIP Kalbar dalam memberikan pelayanan selama Tahun 2024 dinilai **sangat baik** oleh masyarakat.

4.2. Saran

Diharapkan kinerja PPID BPSIP Kalbar dapat terus ditingkatkan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BPSIP Kalbar yang telah di sepakati saat public hearing. Pelayanan publik harus selalu mengikuti tren di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Keterbukaan Informasi Publik.
<http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>

Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik. Jakarta: Biro Hukum dan Informasi Publik.

Biro Hukum dan Informasi Publik. 2009. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bab I Kententuan Umum. Jakarta: Kemtan

Thinkwithgoogle. 2018. Consumer Barometer USA. Januari 2018